KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5303-5875-2121-0389

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.526719/2026

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(04)	Ditjen Badan Peradilan Agama
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(526719)	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Sebesar	:	Rp. 417.080.000	(EMPAT RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

			Jumlah Uang
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	417.080.000
005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	417.080.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	288.800.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	128.280.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 417.080.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5303-5875-2121-0389

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (04)	Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker	: (526719)	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Program	:	005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	417.080.000
Kegiatan	:	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	417.080.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan	
		2. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama	
		3. 01	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama	
		4. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	
		5. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	
		6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	
		7. 01	Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal	
		8. 02	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama	
		9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	
		10. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	
		11. 03	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama	
		12. 04	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	
		13. 05	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama	
		14. 06	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
		15. 07	Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama	
		16. 08	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dilingkungan peradilan agama	
		17. 09	Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	
		18. 10	Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	
		19. 11	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	
		20. 12	Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5303-5875-2121-0389

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (526719) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

21. 13 Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator internal

Klasifikasi Rincian Output	1 :	1053.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	417.080.000
Rincian Output	:	01	AEA.005	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur	8.00	kegiatan	213.800.000
		02	AEA.006	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	1.00	kegiatan	128.280.000
		03	AEA.007	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	1.00	kegiatan	75.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026

DS:5303-5875-2121-0389

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	: (04)	Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker	: (526719)	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	417.080.000
1. Rupiah Murni	Rp.	288.800.000
2. PNBP	Rp.	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Ket :			Pagu	Ekuivalen Rupiah
a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RPLN	US$	0	Rp. 0
b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$	0	Rp. 0
	(2) RHLN	US$	0	Rp. 0
c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0	
d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0	
e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0	
f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026

DS:5303-5875-2121-0389

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (526719) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526719	**Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat**	**-**	**417.080**	**-**	**-**	**-**	**417.080**		
005.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**417.080**	**-**	**-**	**-**	**417.080**		
1053	**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**	**-**	**417.080**	**-**	**-**	**-**	**417.080**		
1053.AEA	Koordinasi	-	417.080	-	-	-	417.080	33 . 01	
	(33.01 PAPUA BARAT / KAB. MANOKWARI)								
01	RM	-	288.800	-	-	-	288.800	065	
04	PNBP	-	128.280	-	-	-	128.280	065	
	JUMLAH	**-**	**417.080**	**-**	**-**	**-**	**417.080**		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:5303-5875-2121-0389

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (526719) Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**526719**	**Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	0	195.270	0	75.000	0	18.530	128.280	0	0	417.080
		BELANJA BARANG	0	0	0	0	195.270	0	75.000	0	18.530	128.280	0	0	417.080
	005.04.BF.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	0	0	0	0	195.270	0	75.000	0	18.530	128.280	0	0	417.080
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	195.270	0	75.000	0	18.530	128.280	0	0	417.080
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
		- PNBP (425239)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026
IV A. B L O K I R

DS:5303-5875-2121-0389

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [526719] Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.04.2.526719/2026
IV B. C A T A T A N

DS:5303-5875-2121-0389

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] Ditjen Badan Peradilan Agama
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [526719] Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004